

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM *CYBERTERRORISM* DI INDONESIA

Oleh

Dermawan Taufik Mangapul Hutauruk

Cyberterrorism dalam perkembangannya telah membangun organisasi dan mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok terorisme konvensional yang beroperasi di Indonesia telah terhubung oleh jaringan terorisme internasional, hubungan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi berupa internet yang sifatnya menjangkau seluruh dunia terutama untuk menyebarkan pesan, menyebarkan ideologi, mengumpulkan dukungan bagi organisasi terorisme, perekrutan anggota, dan berkomunikasi dalam merencanakan suatu serangan nyata serta menggunakan teknologi informasi untuk menggalangan dana untuk kegiatan yang dilakukan oleh kelompok terorisme.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan analisis empiris karena penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan kombinasi antara penelitian normatif dengan empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan *problem identification*, yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik Mabes Polri, Penyidik Polri Densus 88 Anti Teror Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Akademisi bagian Hukum Pidana FH.Unila Lampung. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, hal ini didasarkan pada teori bahwa penelitian normatif.

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap kejahatan *cyberterrorism* menggunakan upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya preventif mewujudkan *cyber taskforce* dengan *real time intrusion detection system network (real time IDS Network)* yang dipergunakan oleh *National Police Agency Of Japan (NPA)*. Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam penegakan hukum *cyberterrorism*

Undang-undang yang mengatur *cyberterrorism* sangat lemah, Aparat penegak hukum harus memiliki kualitas dalam melakukan sistem peradilan pidana terhadap kejahatan *cyberterrorism*, Ketidak siapan intitusi penegak hukum dikarenakan kurangnya sarana dan fasilitas, kesadaran hukum yang lemah.

Kesimpulan upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap kejahatan *cyberterrorism* Upaya represif berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam penegakan hukum *cyberterrorism* yaitu undang-undang yang mengatur *cyberterrorism* sangat lemah; kualitas aparat penegak hukum; tingkat kesadaran hukum masyarakat yang lemah; faktor budaya politik yang menggunakan kesan pemaksaan merupakan satu wujud distorsi perpolitikan masyarakat

Saran diharapkan pemerintah agar cepat melakukan pencegahan dan penanggulangan ancaman *cyberterrorism* lokal maupun internasional yang berkolaborasi dengan tindak pidana terorisme internasional dengan cara membuat undang-undang yang khusus atau meninjau kembali Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mewujudkan pencegahan terhadap kejahatan *cyberterrorism* agar *cyberterrorist* tidak melakukan kejahatannya dengan cara mewujudkan *cyber taskforce*, dengan *real time intrusion detection system network (real time IDS Network)* yang dipergunakan oleh *National Police Agency Of Japan (NPA)* dan melakukan kerjasama menyeluruh antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, segenap lapisan masyarakat, dan negara lain dalam menanggulangi kejahatan *cyberterrorism* dengan jaringan terorisme.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT CYBERTERRORISM ANALYSIS IN INDONESIA

By

DERMAWAN TAUFIK MANGAPUL HUTAURUK

Cyberterrorism in its development organization and has been building a global network in which conventional terrorist groups that operate in several countries have been connected by a network of international terrorism, this connection is done by using information technology in the form of the internet that its reach throughout the world, especially to spread the message, spread the ideology, collect support for terrorist organizations, recruiting members, and communicate in real plan an attack as well as using information technology to menggalangan funds for activities carried out by terrorist groups.

This study using a normative juridical approach, empirical analysis approach because it is based on the type of research is a combination of normative with empirical research. While based on the nature, shape and purpose is deskriptif research and problem identification, by identifying the problems that arise later described by the regulations or the applicable legislation and supported by basic theory related to research. The population in this study is the Investigator Police Headquarters, Police Investigator Densus 88 Anti-Terror Police Lampung, Bandar Lampung District Attorney, District Court Judge in Cape Coral, Academics section of Criminal Law FH.Unila Lampung. Analysis of data used in this study is a qualitative analysis, this is based on the theory that normative research.

Results of research and discussion of data obtained from cyberterrorist role performed by the terrorist network in Indonesia using the Internet for the purposes of the organization and also serves as a communications medium, Personnel and Logistical Support, Intelligence Gathering way is by using carding, hacking and Cracking and propaganda.

Advice given is the law enforcers should be careful in using the basic law or laws in the conduct of law enforcement processes to then be submitted to and accepted by the judge, not apart from nature as a new crime then the crime cyberterrorism eventually require new provisions for the appliance electronic evidence can be accepted as valid evidence. For the Police of the Republic of Indonesia to provide training to members in equipment mengopersonalkan diteksi supervision of work of information technology systems that use the Internet network, improving facilities and supporting infrastructure for the investigation of crime investigation and cyberterrorism in the area, so that these crimes can be prevented as early as

possible, the government needs to immediately increase cooperation with countries in the world in tackling crime cyberterrorism, the government needs to do counseling and socialization of the danger the threat of terrorism groups